



Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Shifa Septiana Universitas Muhammadiyah Jakarta sihifahseptiayan@gmail.com Abdul Rahman Universitas Muhammadiyah Jakarta abdul.rahman@umj.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Septiana, S., & Rahman, A. (2025). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1). 157-163.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan masih banyaknya jumlah anak-anak yang sampai saat ini belum sepenuhnya mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Identitas anak (KIA) di Kota Bogor. Teori yang digunakan yaitu menurut Edward III dengan empat indikator, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan adanya pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya indikator komunikasi, yaitu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bogor belum berjalan secara optimal, karena sosialisasi yang belum maksimal sehingga membuat masyarakat menjadi tidak bisa peduli akan identitas tersebut. Indikator sumber daya, yaitu belum cukup memadai, terlihat bahwa sumber daya manusia dengan pegawai yang masih minim, dan kurangnya fasilitas seperti alat printer KIA. Indikator disposisi yaitu petugas Disdukcapil Kota Bogor sudah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat dengan baik dan proaktif dalam mensosialisasikan KIA, dan adanya layanan inovasi seperti pendaftaran KIA secara online sehingga menunjukkan inisiatif dari pelaksana kebijakan untuk meningkatkan efisiensi. Indikator struktur birokrasi yaitu belum berjalan baik karena tidak terdapat papan informasi mengenai KIA di lingkungan Disdukcapil Kota Bogor. Sarannya yaitu agar bisa lebih ditingkatkan lagi mengenai sosialisasi terhadap program KIA, perbanyak papan informasi mengenai KIA.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program, Kartu Identitas Anak, KIA.

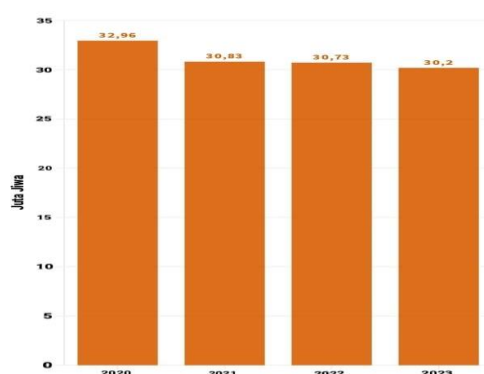
Abstract

This research is motivated by the large number of children who until now do not fully have a Child Identity Card (KIA) at the Bogor City Population and Civil Registration Service. The purpose of this research is to determine how the implementation of the Child Identity Card (KIA) program policy is in Bogor City. The theory used is according to Edward III with four indicators, communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The validity test of the data uses triangulation techniques. The results of the study show that in the communication indicator, namely in the implementation of the Child Identity Card (KIA) program policy in Bogor City has not run optimally, because socialization has not been maximized so that the community cannot care about the identity. Resource indicators, namely human resources, facility resources, and financial resources are not yet adequate, it can be seen that human resources with employees are still minimal, and there is a lack of facilities such as KIA printers. Disposition indicators, namely Bogor City Population and Civil Registry Office officers have shown a high commitment to serving the community well and being proactive in socializing KIA, and the existence of innovation services such as online KIA registration, thus showing the initiative of policy implementers to increase efficiency. Bureaucratic structure indicators, namely not running well because there is no information board regarding KIA in the Bogor City Population and Civil Registry Office environment. The suggestion is that the socialization of the KIA program can be further improved, additional work facilities and infrastructure such as printing KI blank printers, increasing information boards regarding KIA, adding more officers/staff, and reaching the community in Bogor City more fully.

Keywords: Policy Implementation, Program, Child Identity Card, KIA

A. Pendahuluan

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebuah program yang mana diselenggarakan dari pemerintah guna menunjukkan identitas data diri resmi bagi seluruh anak yang menjadi bagian dari penduduk. Oleh karena itu, pemerintah meresmikan Kartu Identitas Anak di satu sisi untuk meningkatkan keselamatan anak, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan pendataan kependudukan. Indonesia merupakan negara dengan jumlah anak usia 0-17 tahun yang sangat besar. Dari data jumlah tabel dibawah ini merupakan total penduduk usia anak 0-17 tahun di Indonesia dalam empat tahun terakhir. Oleh karena itu, sebagai responsnya, pemerintah merencanakan program yang memungkinkan anak berusia 17 tahun ke bawah memperoleh dokumen identitas resmi serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terbaik anak.



Jumlah Anak Usia Dini di Indonesia (2020-2023)

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Selain adanya kepemilikan Akta Kelahiran, kepemilikan KIA juga diartikan sebagai sebuah bentuk identitas pencatatan data diri ataupun sebuah identitas dari seorang anak sebagai warga Negara Indonesia. Dengan membawa KIA saja sudah cukup untuk bisa berpergian keluar kota. Bisa juga KIA ini dipergunakan saat ketempat wisata serta mendapatkan bonus harga bagi yang sudah mempunyai kia. Hal tersebut dibuktikan pada www.disdukcapillbogorkab.id tentang yang sudah memiliki KIA mendapatkan potongan harga, oleh disdukcapil Bogor yang bekerjasama dengan Taman Safari Indonesia, yang mana memberikan adanya sebuah diskon atau potongan harga tiket masuk (HTM) sebesar 10% bagi penduduk atau warga Kabupaten Bogor yang telah mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA) terkhusus untuk individu dengan usia 0 s/d 17 Tahun kurang satu hari.



Unggahan Kampanye Kerjasama Serta Persyaratan

Sumber: Instagram disdukcapil_kabbogor

Berdasarkan dari tabel yang tertera dibawah ini diketahui Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), berupaya untuk meningkatkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), yang saat ini masih tergolong rendah atau belum sepenuhnya mencapai target. Kepemilikan Kartu Identitas Anak di Kota Bogor masi sangat rendah. Dari usia 0-17 tahun wajib KIA dengan jumlah tercatat bahwa:

Presentase Kepemilikan KIA di Kota Bogor	
Tahun	Persen
2020	21,5%
2021	31,17%
2022	41,38%
2023	46.54%

Sumber: Open Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dari data tabel diatas dilihat dari masih minimnya atau sedikitnya kepemilikan Kartu Identitas anak, maka untuk itu pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur perolehan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai salah satu syarat administrasi bersekolah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Agus Supratman, juga berharap KIA ke depandapat dijadikan syarat administrasi wajib sekolah. Cara ini belum berdampak pada manfaat sekolah, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi wajib di kemudian hari. Selain itu, KIA juga dapat berguna untuk pembukaan rekening di bank, BPJS, dan dokumen keimigrasian karena KIA memiliki nama lengkap dan detailnya. Meskipun demikian, kini masih banyak anak di Kota Bogor yang belum memiliki KIA dan terjadi adanya ketidakseluruhan anak-anak yang ada di Daerah Bogor membuat Kartu Identitas Anak (KIA).

Selain belum sepenuhnya kepemilikan KIA pada anak-anak yang ada di Kota Bogor, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui secara jelas dan mendalam apa itu manfaat dan fungsi dari identitas KIA sendiri. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi kurang antusias atau kurang peduli terhadap program pemerintah tersebut.

B. Metodologi

Metode yang diterapkanpada penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali, menggambarkan, mengkaji, serta menguraikan karakteristik atau kelebihan dari dampak sosial yang sulit ditafsirkan atau dinilai dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta uji keabahan dilakukan dengan triangulasi.

Suryono dalam Harahap (2020:123) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali, menggambarkan, mengkaji, serta menguraikan karakteristik atau kelebihan dari dampak sosial yang sulit ditafsirkan atau dinilai dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan berdasarkan hasil observasi yang kemudian dianalisis dan dikumpulkan melalui induksi untuk memperoleh data yang tepat. Pendekatan kualitatif meliputi fakta-fakta empiris, serta pemahaman dan persepsi orang-orang mengenai masalah yang sedang diteliti.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya di indikator komunikasi ini, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sendiri telah berusaha menyadarkan masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya cara sosialisasi yang sampai saat ini masi belum bisa tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat luas, tetapi masyarakat dikalangan lingkungan kecil yang masi terbilang bisa dipantau oleh RT saja belum pernah diadakannya sosialisasi terbuka, sehingga program KIA belum seutuhnya menjangkau anak-anak Kota Bogor, untuk itu kebijakan ini belum cukup dalam menyelesaikan masalah identitas anak secara keseluruhan, tetapi sosialisasi kebijakan KIA telah dilakukan melaui berbagai media, seperti website Disdukcapil, media sosial, serta kerja sama dengan pihak terkait salah satunya kelurahan, tetapi masih banyaknya masyarakat di Kota Bogor yang belum merasa terbantu atau memahami betul akan manfaat dari program KIA, sehingga dengan tidak taunya manfaat tersebut membuat masyarakat menjadi tidak perduli dengan Kartu Identitas bagi Anak tersebut, sejauh ini masyarakat tidak merasakan adanya dari tujuan program salah satunya perlindungan hak anak sehingga komunikasi informasi yang diberikan tidak tersampaikan secara optimal, sedangkan berdasarkan hasil observasi di lapangan memang masyarakat yang mengurus identitas anak tersebut tidak sebanyak masyarakat mengurus kartu kependudukan lainnya yang mereka tau bisa lebih bermanfaat, dan memang dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sudah memberikan informasi melalui sosial media tetapi upaya tersebut juga masih kurang karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat identitas KIA tersebut.

2. Sumber Daya

Bahwasannya sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor baik sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas belum cukup memadai, tetapi sumber daya finansial sudah cukup baik. Terlihat bahwa sumber daya manusia dengan pegawai yang masih minim, sumber daya finansial cukup baik, dengan masyarakat tidak dibebankan biaya dalam mengurus pembuatan Kartu Identitas Anak, tetapi tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah untuk mempercepat pencetakan dan distribusi KIA karena besaran anggaran dihitung dari pelaksanaan-pelaksanaan seperti pada kegiatan harian, anggaran yang mencukupi tersebut cenderung anggaran yang ketat dengan total 14.532.213.698 di tahun 2023. Akan tetapi berdasarkan informasi yang tersedia, total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor untuk tahun 2021 adalah Rp16.089.860.930, yang terdiri dari Belanja Operasi: Rp14.449.681.578, Belanja Pegawai: Rp8.942.341.472, Belanja Barang dan Jasa: Rp5.507.340.106, Belanja Modal: Rp1.640.179.352, Belanja Modal Peralatan dan Mesin: Rp1.640.179.352 Namun, rincian spesifik mengenai alokasi anggaran untuk program Kartu Identitas Anak (KIA) tidak ditemukan dalam sumber informan yang tersedia, sedangkan berdasarkan observasi dilapangan yaitu pihak Disdukcapil sendiri sudah mengantisipasi untuk ruang tunggu disediakan secara nyaman serta untuk orangtua yang prioritas membawa anak-anak yang tentunya anak-anak akan gampang sekali bosan untuk bisa menunggu nomor antrian, untuk itu Disdukcapil Kota Bogor menyediakan taman bermain untuk anak agar tetap nyaman dan pelayanan yang petugas berikan bisa berjalan efisien, lalu berdasarkan hasil dokumentasi yang ada, diketahui bahwa fasilitas kerja untuk percetakan KIA hanya tersedia satu unit mesin saja. Situasi ini berpotensi menyebabkan proses publikasi identitas KIA menjadi lebih lambat, yang pada akhirnya memperpanjang waktu tunggu pelayanan yang diterima oleh pemohon.

3. Disposisi

Terkait sikap dalam pelaksanaan program KIA ini yaitu pemerintah sendiri salah satunya petugas dari Disdukcapil sudah cukup respon dalam memberikan informasi, tetapi belum sepenuhnya bisa memberikan bantuan terhadap masyarakat khalayak bawah, maka kebijakan ini dikatakan belum cukup responsif dalam menjalankan kebijakan KIA yang dibutuhkan, tetapi keunggulan dari indikator ini yaitu petugas Disdukcapil Kota Bogor menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat dengan baik dan proaktif dalam mensosialisasian KIA, dan adanya layanan inovasi seperti pendaftaran KIA secara online sehingga menunjukkan inisiatif dari pelaksana kebijakan untuk meningkatkan efisiensi. Dan ketika ada perilaku petugas yang kurang baik, Disdukcapil Kota Bogor menyiapkan mekanisme keluhan-keluhannya di tampung baik melalui media, atau melalui aplikasi pakuan prima, jadi ketika memang ada keluhan sampaikan baik itu secara langsung atau kritik melalui media atau instagram, sedangkan berdasarkan hasil observasi pelayanan yang diberikan untuk bagian loket

percepatan KIA belum sepenuhnya maksimal, yang menyebabkan kondisi tersebut menyebabkan waktu pelayanan bisa menjadi cukup lama yang mana mencerminkan tidak optimalnya pelayanan penerbitan KIA tersebut, dan pengambilan dokumen kependudukan seperti e-KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan sebagainya memang ditempat yang sama. Hal tersebut mengingat beban kerja yang cukup banyak, minimal pelayanan membutuhkan sekurang-kurangnya dua orang petugas. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelayanan umumnya lebih dari 15 menit atau cukup lama yang mencerminkan kurang optimalnya komitmen pelayanan penerbitan KIA.

4. Struktur Birokrasi

Terkait pelaksanaan program KIA yang kaku dan kompleks bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan KIA. Seperti masyarakat belum mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan saat pembuatan identitas tersebut. Padahal pemerintah hanya memberlakukan prosedur pengurusan KIA hanya dengan memerlukan dokumen dasar seperti KTP orangtua dan akta kelahiran, dari ketidaktauan informasi tersebut menjadi belum sepenuhnya program bisa menjangkau yang ada di Kota Bogor karena dari Capil Bogor sendiri belum sepenuhnya bekerjasama dan mensosialisasikan kepada seluruh pihak sekolah, tetapi semua penerbitan sudah di antisipasi aman, nyaman dan tidak berbayar. Dari situ masyarakat sudah dipermudah tidak ada dipersulit hanya masyarakat dimohon kesadarannya, tetapi penemuan dari keunggulan indikator ini yaitu bahwasannya di Kota Bogor sudah menerapkan sistem pelayanan berbasis digital untuk bisa mempercepat proses administrasi, lalu berdasarkan hasil observasi tidak terdapat papan informasi mengenai KIA di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan informasi

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait “Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor” menggunakan teori Edward III dapat disimpulkan bahwa indikator komunikasi, yaitu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Bogor belum berjalan secara optimal, karena komunikasi sosialisasi yang belum maksimal sehingga membuat masyarakat menjadi tidak bisa peduli akan identitas tersebut. Indikator sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas belum cukup memadai, tetapi sumber daya finansial cukup baik terlihat bahwa sumber daya manusia dengan pegawai yang masih minim, dan kurangnya fasilitas seperti alat printer KIA. Indikator disposisi yaitu petugas Disdukcapil Kota Bogor sudah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat dengan baik dan proaktif dalam mensosialisasikan KIA, dan adanya layanan inovasi seperti pendaftaran KIA secara online sehingga menunjukkan inisiatif dari pelaksana kebijakan untuk meningkatkan efisiensi. Indikator struktur birokrasi yaitu belum berjalan baik karena tidak terdapat papan informasi mengenai KIA di lingkungan Disdukcapil Kota Bogor, belum adanya bantuan langsung dari pemerintah untuk masyarakat bisa mengakses informasi terkait KIA terkhusus yang bertempat tinggal di daerah terpencil atau daerah yang cukup terbatas. Hambatan terhadap implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu kurangnya sosialisasi KIA dengan masyarakat Kota Bogor serta tidak sepenuhnya proses sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat bisa menjangkau, dan kurangnya kepedulian atau kesadaran masyarakat dalam memperoleh kepemilikan KIA.

Saran

Penulis dalam penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi atau saran terkait program evaluasi Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bogor berikut ini:

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor agar bisa melaksanakan sosialisasi lebih kepada masyarakat secara langsung dan lebih ditingkatkan lagi kerjasama tidak hanya dari Kecamatan ataupun kelurahan tetapi juga dari pihak-pihak sekolah ataupun kader-kader posyandu yang bisa lebih terkhususkan untuk anak dibawah umur tersebut
2. Disdukcapil Kota Bogor perlu lebih kreatif dalam menggunakan alat promosi program, jangan hanya bepatok pada media sosial tetapi bisa melalui penempelan spanduk, ataupun iklan layanan masyarakat di stasiun televisi lokal sehingga dengan begitu membuka peluang agar target penerbitan KIA dapat segera tercapai.

3. Disdukcapil Kota Bogor perlu menambah petugas untuk pelaksanaan program KIA serta memenuhi sarana prasarana kerja yang ada terkhusus printer untuk mencetak kartu KIA nya.
4. Sebaiknya diadakan pelatihan di lingkungan Disdukcapil Kota Bogor untuk para petugas/staff yang bertugas agar meminimalisir kesalahan fatal yang dibuat.
5. Untuk program KIA bisa sepenuhnya menjangkau yang ada di Kota Bogor, sebaiknya Disdukcapil Kota Bogor terus mengupayakan pemantauan untuk program agar lebih mengetahui sudah sejauh mana program tersebut terjangkau.

E. Referensi

- Amanah, S. N., & Reviandani, O. (2023). Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Aplikasi Klampid New Generation Di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 9(1), 68–77. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i1.6825>
- Awaludin. (2020). Kartu Identitas Anak Segera Diberlakukan di Kota Bogor; Bakal jadi Syarat Masuk Sekolah. Radar Bogor.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Jumlah Data Penduduk di Kota Bogor Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin*. <https://Bogorkota.Bps.Go.Id>.
- Brianda, W. O., & Hasan, A. (2022). Efektifitas Pelayanan Jemput Bola Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 397–410. <https://doi.org/10.47233/jeb.v2i1.122>
- Choerunnisa, R. R., & Rosinta, R. (2021). Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 8(6), 429. <https://doi.org/10.30865/jurikom.v8i6.3762>
- Devauli, B., Herbasuki, & Marom, A. (2024.). *Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Anak di Kota Semarang*.
- Dewi, N. R. (2020). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 10 (1), 9-13. <https://doi.org/10.33592/jiia.v10i1.525>
- Dan, K., Sipil, P., Bengkulu, K., Agustin, A., Saputra, H. E., & Rikardo, Y. (2024). *Evaluasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas*. 11(2), 643–652.
- Dr. Bhavesh A. Prabhakar, & डॉ. गुरुदत्तपी. जपी. (2023). भारतके अंतरिक्ष कार्यक्रमों और इसरो के पीएसएलवी, जीएसएलवी प्रक्षेपकों की क्षमता की पृष्ठभूमि में चंद्रयान -1, 2, 3 अभियानों की भूमिका का आकलन. *International Journal of Research in Science, Commerce, Arts, Management and Technology*, 2(November), 410–421. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-13062>
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bogor. Profil Anak Kota Bogor Tahun 2022. Pusat Kajian Gender dan Anak.
- Disdukcapil.depok.go.id. (2024). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. *Disdukcapil.Depok.Go.Id* , 45.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. (2022)
- Deti Mega Purnamasari, K. (2021). *Risiko Anak Yang Tak Punya Akta Kelahiran Menurut PPPA*. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/05/27/12371911/Ini-Risiko-Anak-Yang-Tak-Punya-Akta-Kelahiran-Menurut-Kementerian-Pppa#:~:Text=%22Beberapa%20risiko%20tidak%20memiliki%20akta,Informasi%2C%20dan%20Partisipasi%20Anak%20Kemen>.
- Fadillah, Z., & Trimurni, F. (2023). Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Science and Social Research*, 6(1). <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1210>
- Fauzia, D. (2021). *Risikonya Jika Anak Tidak Memiliki Akta Kelahiran*. <https://Www.Popmama.Com/Big-Kid/6-9-Years-Old/Dela-Fauzia/Apa-Risikonya-Jika-Anak-Tidak-Memiliki-Akta-Kelahiran>.
- Fadlan, H. (2021). Proses Manajemen Komunikasi Dalam Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor.
- Fadhli.,H (2023). EVALUASI PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL LAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANSJAKARTA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Lilis Wahyuni. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU Implementasi Kebijakan pada Pelayanan. *Administrasi Publik & Bisnis*, 4(1), 50–53.
- Limbong, L. V. S. (2022). Evaluasi Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Komunikasi Dan Adminitrasi Publik*, 9(2), 393–404. <https://103.81.100.214/handle/123456789/2947>
- Martha, L. P., & Adiyasa, I. S. (2022). Analisis Strategi Komunikasi Dalam Sosialisasi Program Kartu Identitas Anak. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 6(1), 9–18. <https://doi.org/10.33751/jpsik.v6i1.5315>
- Open Data Kota Bogor. (2025) Presentase Anak Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bogor. *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.
- Putri, I. S., Samin, R., & Hendrayady, A. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Evaluation of Implementation of Child Identity Card Program By the Ministry of Education and Civil Registration of Karimun District. *Journal Articiel*, 5.
- Rohman, N., Wirjatmi, E., Lestari, T., & Sufianti, E. (2021). Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Purwakarta. *Ilmu Administrasi Negara*, 8, 130–141.
- RISPATI NINGSIH. (2021). *Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. 1–64.
- Setiawan, B., Fatchiya, A., Alfiasari, R. (2021). Profil Anak Kota Bogor Tahun 2021. *Pusat Kajian Gender Dan Anak Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor*, 1–23.
- Syahril Firdaus Mendrova. (2023). *Skripsi Evaluasi Program Bike Sharing di DKI Jakarta*. Repository Fisip UniversitasMuhammadiyah Jakarta.